

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hak yang harus didapatkan oleh setiap manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pernyataan tersebut mengacu pada UUD Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga seluruh masyarakat perlu mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan. Hal ini ditegaskan pada UUD RI 1945 pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Pada cakupan yang lebih luas, hak untuk mendapatkan pendidikan juga ditegaskan di seluruh dunia. Pada cakupan ini, hak asasi manusia dinilai bersifat universal sehingga berlaku untuk semua orang di seluruh dunia, seperti yang dikutip dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia khususnya dalam bidang pendidikan pasal 26 bahwa “setiap orang berhak memperoleh pendidikan”. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Mengingat bahwa sebuah hak khususnya pendidikan harus didapatkan oleh semua orang, maka pendidikan wajib diberikan tidak hanya untuk orang-orang normal saja, tetapi dapat diperoleh juga oleh mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hak untuk memperoleh pendidikan berhak didapatkan oleh seluruh warga negara, seperti yang tercantum dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 pasal 54 yang menyatakan bahwa setiap anak yang memiliki cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus dari biaya negara untuk menjamin kehidupannya. Hal tersebut dapat dicapai melalui penerapan pendidikan inklusif. UU No. 70 Tahun 2009 khususnya pasal 2, berbunyi bahwa pendidikan inklusif dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua peserta didik tanpa terkecuali sebagai wujud penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.

Pada dasarnya, anak-anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, meliputi kondisi, budaya, fisik, intelektual, linguistik, dan sebagainya. Maka dari itu, peran pendidikan sangatlah penting, khususnya pendidikan untuk anak usia dini. Pendidikan ini bertujuan untuk membimbing anak agar berkembang secara optimal sebagai bekal untuk masa depannya dan memiliki keterampilan fungsional sehingga tidak bergantung pada bantuan orang lain. Menurut (Antara, 2019), untuk menciptakan generasi yang berkualitas maka anak perlu diberikan berbagai stimulasi sejak usia dini baik secara fisik maupun mental. Pendidikan sejak dini dilakukan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak yang diselenggarakan melalui jalur formal, informal, dan non formal. Pendidikan formal dilaksanakan secara terstruktur dan

memiliki jenjang yang diselenggarakan di sekolah, pendidikan informal dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sedangkan pendidikan non formal adalah suatu pendidikan yang diselenggarakan bagi masyarakat untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat (Hermawan, 2015).

Sebagai pendidikan yang paling dasar, maka pendidikan anak usia dini juga harus dapat merangkul keanekaragaman dan kebutuhan dari seluruh peserta didik melalui pendidikan inklusif yang diterapkan pada jenjang tersebut. Pendidikan tersebut dapat digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tentang anak berkebutuhan khusus (ABK). Maka dari itu, pendidikan inklusif sangat penting untuk diterapkan. Peserta didik ABK dan non ABK dapat belajar bersama melalui pendidikan inklusif, sebagai persamaan hak yang harus didapatkan semua anak. Selain itu, ABK dapat belajar lebih optimal karena mereka dapat berinteraksi secara langsung dan diberikan penanganan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena semakin kompleks kekhususannya maka semakin banyak penanganan yang dibutuhkan oleh anak.

Pendidikan inklusif adalah suatu pendidikan yang pada proses pembelajarannya memasukkan ABK di kelas reguler (Dapa, Duyo, & Marentek, 2007). Menurut Alimin, Z. (Rahim, 2016) sekolah inklusif merupakan sekolah reguler yang memberikan pendidikan kepada semua peserta didik tanpa memandang perbedaan kondisi anak, baik anak yang normal maupun anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, bakat, suku, korban bencana alam dan sosial, warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal,

kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak terlantar, anak tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA), maupun anak nomaden. Senada dengan pendapat tersebut *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (Tarmansyah, 2007) menyatakan bahwa pendidikan inklusif memiliki arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik atau kondisi lain mereka. Hal ini termasuk anak cacat/berkelainan dan anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak berbakat, anak jalanan dan anak pekerja, anak dari populasi terpencil dan pengembara, anak dari linguistik, etnik dan budaya minoritas dan anak-anak dari bidang kelemahan atau kelompok marginal lain. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan di sekitar masyarakat bahwa tidak semua anak dapat melewati masa perkembangannya dengan baik dan tumbuh menjadi individu yang bersahaja (Antara, 2016).

Jumlah ABK di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data BPS tahun 2005 menunjukkan bahwa terdapat 4,2 juta ABK dan pada tahun 2007 ada 8,3 juta ABK di Indonesia (Tarnoto, 2016). Selain itu, berdasarkan lokadata yang bersumber dari Kemendikbud jumlah siswa ABK di Indonesia pada 2017/2018 mencapai 128.721 siswa. Secara spesifik penyandang disabilitas di Provinsi Bali jumlahnya mencapai 3,4 ribu. Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 hanya 5,48% penyandang disabilitas yang masih sekolah dan penyandang disabilitas yang belum atau tidak pernah bersekolah sama sekali mencapai 23,91%.

Data ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Salah satu faktor penyebab dari sedikitnya anak berkebutuhan khusus yang masih sekolah adalah kurangnya sekolah inklusif yang dapat mengakomodasi mereka.

Terdapat beberapa hambatan pada penerapan pendidikan inklusif di Indonesia yang menyebabkan belum semua lembaga pendidikan menerapkan pendidikan inklusif. Hambatan yang pertama yaitu kenyataan bahwa pada umumnya di Negara Indonesia belum banyak sekolah yang menerima dan melayani ABK, meskipun ada namun hanya beberapa dan terletak di kota-kota besar sehingga tidak terjangkau oleh lapisan masyarakat yang tinggal di daerah padahal di manapun tempat tinggalnya, ABK tetap memerlukan pendidikan. Usaha untuk mengakomodasi ABK dalam penyelenggaraan pendidikan telah diupayakan oleh pemerintah dalam bentuk sekolah luar biasa (SLB), namun belum dapat menampung ABK secara keseluruhan. Kedua, ABK dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Hal inilah yang menjadikan ABK sering dikucilkan atau termaginalkan dari lingkungan sekitar dan sering menerima perlakuan yang diskriminatif dari orang lain. Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Ketiga, pemerintah sudah mencanangkan pendidikan inklusif namun untuk saat ini rencana tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masih banyak hambatan yang dihadapi di masyarakat sehingga penerapan pendidikan inklusif belum optimal. Keempat, beberapa sekolah regular tidak mau menerima anak berkebutuhan khusus sebagai siswa, karena guru di sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing ABK.

Kurangnya sekolah inklusif khususnya di Singaraja menyebabkan ketidakselarasan pendidikan di antara anak non ABK dan ABK. Berdasarkan pengamatan di luar penelitian ini, peneliti menemukan bahwa masih banyak peserta didik ABK yang mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah reguler bukan sekolah inklusif. Tentu saja hal ini berpengaruh terhadap pencapaian dan perkembangan anak karena perbedaan kebutuhan tidak bisa dipenuhi secara mutlak. Selain masalah sekolah, hal yang mengkhawatirkan adalah peran guru dalam menangani siswa. Tidak semua guru mengetahui kebutuhan anak dengan tepat, sehingga pembelajaran yang diberikan bersifat monoton. Contohnya, pada salah satu sekolah reguler di Singaraja terdapat siswa yang mengalami keterlambatan bicara, namun guru tidak menyadari hal tersebut. Asesmen yang diberikan guru tidak tepat sehingga anak tidak mendapatkan penanganan yang sesuai.

Penelitian ini dilakukan di TK Rare Bali School karena TK ini merupakan lembaga pendidikan taman kanak-kanak yang menerapkan pendidikan inklusif di Kota Singaraja. Sejak tahun 2017, sekolah ini dapat menerima peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang dan kondisi termasuk ABK. Terdapat 55 siswa yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A berjumlah 25 siswa dan 2 di antaranya merupakan ABK, sedangkan kelompok B berjumlah 30 siswa. Adapun jenis kebutuhan khusus yang ada di TK Rare Bali School adalah *down syndrome*, *speech delay* atau terlambat bicara, *lost focus*, dan *asperger syndrome*. Dalam satu kelas terdapat 3 guru yang mendampingi siswa, 1 guru utama dan 2 guru

pendamping. Jika dibutuhkan, ABK akan didampingi oleh *shadow teacher* atau guru pendamping khusus.

TK Rare Bali School digunakan sebagai lokasi penelitian karena sekolah ini memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan khusus dari peserta didik. ABK tersebut diberikan penanganan lebih sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh peserta didik dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 2013 yang telah dimodifikasi berdasarkan kebutuhan khusus peserta didik. Sekolah ini juga menerapkan program ramah anak yang mewajibkan seluruh guru untuk mengayomi siswa sebagai bentuk rasa menghargai keberagaman yang dimiliki oleh anak. Tempat dan suasana belajar yang menyenangkan tercermin dari kegiatan belajar dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan pada TK Rare Bali School sehingga menjadi tempat yang ideal bagi anak.

Sekolah ini merupakan lembaga yang tepat untuk diteliti karena program layanan penunjang di TK Rare Bali School yang sangat beragam, program-program tersebut antara lain: *parenting conference*, *school camp*, yoga, festival budaya, *gardening*, hari berbahasa Bali, dan hari Berbahasa Inggris. Metode yang digunakan adalah metode *grouping* yang terdiri dari 4 grup dalam satu kelas yang berisi 6-7 orang. Pada penerapan pembelajaran di TK Rare Bali School, setiap harinya selalu memunculkan 4 aspek perkembangan dengan berbagai jenis kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka proses pengimplementasian pendidikan inklusif menjadi hal yang menarik dan penting untuk diteliti. Terlebih

lagi, sampai saat ini belum ada penelitian yang berfokus pada hal tersebut khususnya pada lembaga TK inklusif di Singaraja. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan desain studi kasus untuk mempelajari lebih dalam bagaimana penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran TK di TK Rare Bali School Singaraja. Secara lebih spesifik, peneliti memiliki keinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Penerapan Pendidikan Inklusif pada Pembelajaran di Taman Kanak-kanak (Studi Kasus pada TK Rare Bali School)”.

### **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

1. Keberagaman peserta didik mendasari TK Rare Bali School untuk menerapkan pendidikan Inklusif, sehingga seluruh peserta didik baik ABK dan non ABK memiliki kesempatan belajar yang sama. Sedangkan di TK pada umumnya, perbedaan kondisi dari peserta didik belum dapat diakomodasi dengan optimal.
2. Materi dan metode yang diterapkan dalam pembelajaran di TK Rare Bali School sudah menyesuaikan dengan kebutuhan seluruh peserta didik, sedangkan di TK pada umumnya belum menerapkan hal tersebut.
3. Guru di TK pada umumnya belum mampu melakukan asesmen terhadap peserta didik dan tidak menyadari kekhususan yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik tidak mendapatkan layanan yang tepat saat mengikuti pembelajaran.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya topik pembahasan tentang pendidikan, maka peneliti membatasi masalah menjadi proses penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran Taman Kanak-kanak khususnya di TK Rare Bali School Kota Singaraja.



#### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan penjabaran di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah proses pembelajaran di TK Rare Bali School dalam menerapkan pendidikan inklusif?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan mendiskripsikan lebih dalam tentang penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran taman kanak-kanak khususnya di TK Rare Bali School Kota Singaraja.

#### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

##### **1.6.1 Segi Teoritis**

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pendidikan untuk anak usia dini (PAUD).
- b. Untuk mendiskripsikan dan mengkaji lebih dalam penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran anak usia dini.
- c. Memperkuat teori bahwa pendidikan yang menerapkan model inklusif dapat bermanfaat dan meningkatkan berbagai aspek perkembangan peserta didik.
- d. Mengkaji penerapan pendidikan inklusif yang sesuai dengan pembelajaran di sekolah taman kanak-kanak.

### 1.6.2 Segi Praktis

#### a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan dapat menjadi model atau contoh bagi sekolah lainnya dalam menerapkan pendidikan inklusif pada pembelajaran anak usia dini pada taman kanak-kanak.

#### b. Bagi Pihak Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas sekolah terutama pada penerapan pendidikan inklusif.

#### c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti dapat menambah pembelajaran dan pengalaman tentang keilmuan PAUD dan penerapan pendidikan inklusif.

#### d. Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya

